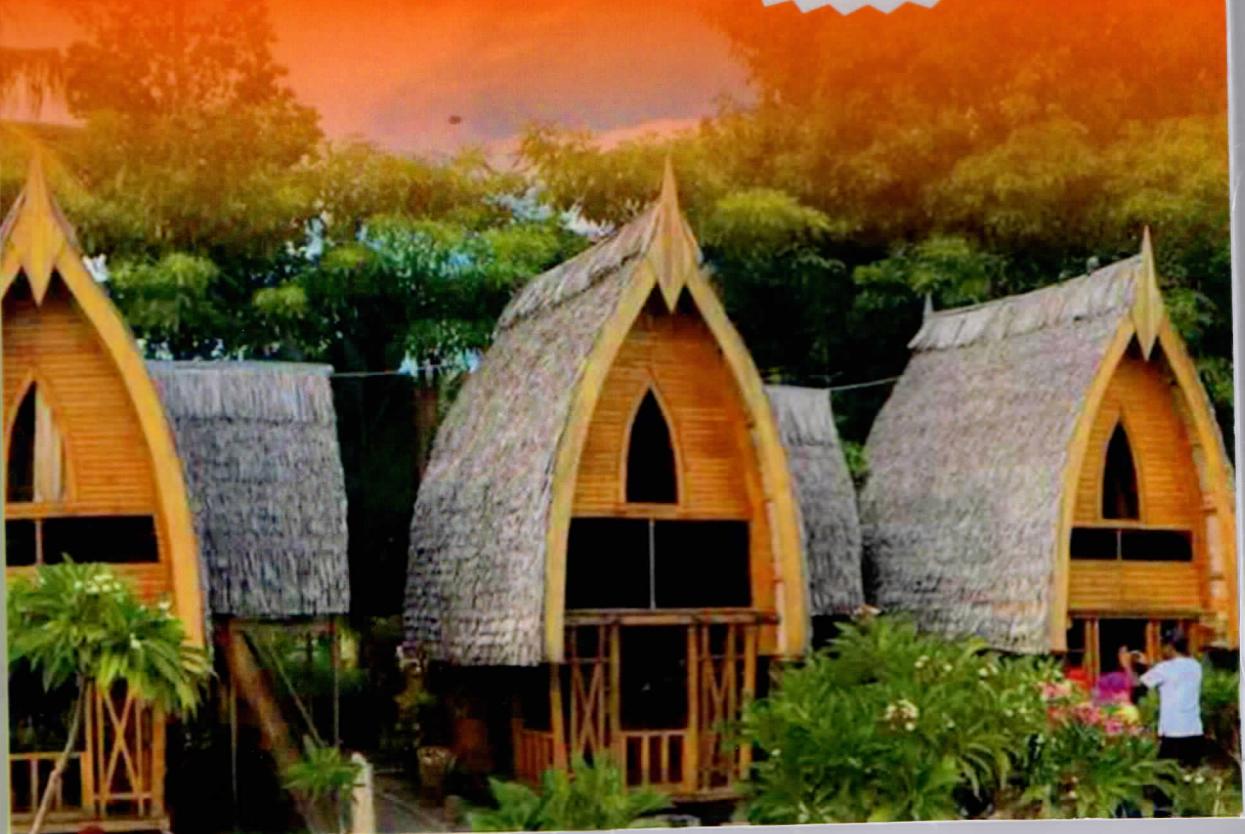


Yumanraya Noho

ideas
PUBLISHING

Pengelolaan Desa Wisata

Religi



PENGELOLAAN DESA WISATA RELIGI

Yumanraya Noho



KATA PENGANTAR

IP.030.06.2017

Pengelolaan Desa Wisata Religi
Yumanraya Noho

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh **Ideas Publishing**, Juni 2017

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo
Telp/Faks. 0435 830476
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota Ikapi, No. 001/gtlo/II/14

ISBN : 978-602-6635-23-5

Penyunting: Abdul Rahmat
Penata Letak: Dede Yusuf
Ilustrasi dan Sampul: Andri Pahudin

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah
yang telah memberikan semua rahmat dan karunia-Nya
hingga kami dapat menyusun buku ini. Pada kesempatan ini
kami mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya
kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesaianya
buku ini. Semoga amal baik yang telah diberikan mendapat
balasan yang berlipat ganda. Amin.

Akhirnya kami berharap semoga ini dapat dimanfaatkan
oleh para peneliti lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai
referensi ilmiah dan keluaran yang ingin dicapai dari
penulisan ini dapat terwujud dan bermanfaat bagi kemajuan
pengetahuan.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	1
Bab I Pendahuluan	11
Bab II Peningkatan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>)	9
Bab III Desa Wisata	1
Bab IV Pengelolaan Desa Wisata Religi	25
Bab V Kepariwisataan Desa Bongo	29
Bab VI Pembentukan Desa Bongo sebagai Desa Wisata Religi	35
Bab VII Atraksi Wisata Religi “Festival Walima”	57
Bab VIII Atraksi Wisata Buatan	65
Bab IX Atraksi Wisata Budaya & Alam	71
Bab X Penutup	81
Daftar Pustaka	85
	91

Sejak dikenalkannya konsep desa wisata sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif¹, maka jumlah desa wisata di Indonesia mengalami peningkatan tajam baik jumlahnya yang menyebar di berbagai pelosok tanah air. Jumlah tersebut mengacu pada data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa di tahun 2012 di Indonesia memiliki sekitar delapan puluh desa wisata yang meningkat drastis dibanding tahun 2009 yang hanya tercatat 144 desa untuk tujuan pariwisata². Optimisme yang memprovokasi terbentuknya desa desa wisata umumnya berasal dari keyakinan bahwa potensi daya tarik yang dimilikisiperti alam, budaya, dan tradisi masyarakat, mampu menarik minat sekelompok wisatawan

¹ Di Eropa terdapat bentuk-bentuk pariwisata yang berkembang sejak tahun 1980-an yaitu wisata pedesaan (*village tourism*) yang terdiri dari wisata di lahan pertanian dan perkebunan (*farm tourism*). Bentuk pariwisata ini merupakan pariwisata alternatif (Lihat Fandeli, 2002).
<http://www.suaramerdeka.com> diakses 8 oktober 2013.

Religi

BAB I PENDAHULUAN

baik domestik maupun internasional. Peluang tersebut muncul sejak terjadinya trend perubahan aspek psikografis dan demografis individu maupun sekelompok wisatawan di seluruh dunia yang bergeser meninggalkan jenis pariwisata konvensional yang sifatnya massal menuju jenis pariwisata alternatif yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (Mowforth and Munt, 1998; Cooper and Hall, 2008; Fandell, 2002; Damanik dan Weber, 2006).

Agenda utama yang ingin dicapai dari keberadaan desa wisata adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Namun banyak kalangan mengkritik bahwa dampak besarannya devisa³ yang dihasilkan dari industri pariwisata tidak berkorelasi secara langsung dengan penurunan angka kemiskinan. Timbul perdebatan para ahli yang mengatakan bahwa perkembangan industri pariwisata dianggap sebagai kapitalisasi perekonomian bagi para investor dengan modal besar yang justru memmarginilasi keberadaan masyarakat miskin⁴. Cita-cita untuk mengembangkan sektor pariwisata demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat

³ Sumbangan sektor pariwisata internasional mencapai US \$ 1,075 trilyun dengan pertumbuhan sebesar 4% di tahun 2012 (un-wto.org). Di (investor.co.id)

⁴ Adanya prinsip ekonomi pasar yang mengutamakan pengembangan diorganisir oleh masyarakat lokal. Dengan cara ini tidak jarang masyarakat lokal yang merupakan salah satu pemangku kepentingan menjadi terpinggirkan dari pengelolaan sumberdaya pariwisata (UNED-JK, 1998) dalam Damanik (2005).

⁵Juta WPS pada Maret 2013 menunjukkan bahwa angka masyarakat

berdampak sebaliknya, yakni pariwisata yang berdampak masyarakat di segala bidang (Damanik, 2005; Damanik, 2008). Singkatnya, pencapaian devisa dari sektor pariwisata tidaklah seimbang bila disandingkan dengan jumlah masyarakat miskin⁵.

Berlepas dari problematika berkepanjangan antara masyarakat dan kemiskinan, kita tetap dapat merespon positif menjamurnya desa-desa wisata. Setidaknya masyarakat lokal menemukan celah untuk terlibat dan mendapat manfaat dari sumberdaya wisata yang mereka miliki. Masyarakat lokal adalah komponen yang harus diikutsertakan dalam berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pembangunan keputusan, hingga yang harus menanggung dampak kumulatif dari perkembangan wisata (Murphy, 1985; Bijujiwo, 2012; Damanik, 2013). Dengan kata lain komponen masyarakat lokal adalah aktor yang akan berperan sebagai pengelola segala bentuk aktivitas kepariwisataan di desa.

Desa Wisata Religi Bongo adalah salah satu ratusan desa wisata yang telah terbentuk di Indonesia. Desa yang administratif merupakan bagian dari Kecamatan Bajauha Pantai, Kabupaten Gorontalo ini diresmikan dengan tanda tinta pada tanggal 9 Mei tahun 2004. Desa Bongo

diresmikan dengan nama “Desa Wisata Religi”. Pemilihan konsep “religi” adalah gagasan yang dirintis oleh Bapak Yonef Tahir Maruf berdasarkan daya tarik utamanya yakni tradisi budaya islam berupa perayaan “Walima” yang dilaksanakan setiap Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijiriah.Saat ini tradisi Walima telah ditetapkan sebagai *Calendar of Event* budaya pariwisata Provinsi Gorontalo. Di samping itu,desa ini menyimpan daya tarik alam perbukitan, pantai, dan beberapa peninggalan sejarah. Perpaduan daya tarik budaya religiislami, alam, dan sejarah ini menjadikan Desa Bongo memiliki keistimewaan dan menjadi salah satu desa sasaran pengembangan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Gorontalo.

Sebagai desa wisata yang sudah cukup lama terbentuk, seharusnya desa ini telah memasuki tahap kemandirian masyarakat untuk mengelola pariwisata di daerahnya. Kemajuan desa wisata dari segi fisik harus diimbangi dengan kapasitas yang memadai daripengelola untuk menjalankan program-program desa wisata, sebab tingkat kapasitas pengelola yang rendah akan berpotensi menghambat kemajuan sebuah desa wisata.Oleh karena itu isu mengenai kapasitas pengelola desa wisata ini kemudian menjadi sebuah kebutuhan untuk diidentifikasi. Kebutuhan tersebut berangkat dari

berikut bahwa permasalahan terkait Desa Wisata Religi yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Perihal mayoritas penduduk Desa Bongo bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Jenis pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kepariwisataan ini tentu saja memerlukan sebuah proses transformasi untuk mengelola kebutuhan sebagai aktivitas baru bagi masyarakat. Dari pranatal yang dilakukan peneliti di tahun 2012 muncul permasalahan diinjau dari kapasitas atau kemampuan pengelola desa yang nongelola pariwisata di Desa Bongo. Pengelolaan sektor pariwisata di desa ini masih sangat bergantung pada Bapak Yusuf (perintis Desa Wisata Religi Bongo). Dirinya memiliki posisi yang dominan dalam mengemukakan gagasan, implementasi program, bahkan mengeluarkan dana yang besar untuk membangun beberapa atraksi wisata buatan bersama para ahli pariwisata. Kondisi ini menimbulkan asumsi bahwa komponen pengelola lainnya belum sepenuhnya memiliki kapasitas memadai untuk mengelola pariwisata di desa ini. Hal ini didukung dengan laporan tim Pendampingan PNPM Pariwisata 2013 yang menyebutkan bahwa masyarakat masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam manajemen desa wisata (Puspar UGM, 2013).Asumsi sementara tersebut perlu diindaklanjuti dengan identifikasi lebih dalam dengan menggunakan indikator-indikator kapasitas baik individual maupun organisasional dalam mengelola desa wisata.

Kedua, ketika menelusuri pustaka, hasil-hasil penelitian tentang desa wisata didominasi oleh obyek penelitian di desa wisata kawasan barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Kondisi ini menyebabkan justifikasi terhadap kapasitas pengelolaan desa-desa wisata kawasan tengah dan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo agak terabaikan. Memang pada beberapa data dari pemerintah, kita dapat mengakses laporan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat misalkansaja pada laporan PNPM Pariwisata⁶. Tetapi sering sekali ditemukan ketidakpuasan pada hasil evaluasi yang terkesan tidak secara detail memuat informasi tingkat kapasitas masyarakat setempat. Penyebabnya adalah proses evaluasi tersebut sarat dengan berbagai keterbatasan antara lain waktu dan biaya, serta berbagai persoalan politis lainnya yang dapat menurunkan tingkat keakuratan dan obyektivitas data. Di sisi lain, analisis yang akurat dan obyektif sangat dibutuhkan untuk menuntaskan permasalahan desa wisata. Pemerintah harusnya menghindari pelaksanaan program peningkatan kapasitas masyarakat yang terkesan seragam untuk seluruh desa wisata di Indonesia,

melandikkan lebih kontekstual atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan⁷. Demikian halnya dengan Desa Wisata Religibongo yang masih dalam tahapan berkembang. Masih sangat dibutuhkan sebuah penelitian yang secara substansial membahas tingkat kapasitas pengelola yang diharapkan dapat membantu menuntaskan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam menjalankan roda pariwisata di desa tersebut.

Uraian permasalahan di atas menggerucut pada substantasi untuk meneliti tingkat kapasitas pengelola Desa Wisata Religi Bongo. Tujuan utamanya adalah membantu kemajuan desa wisata yang tidak hanya handal dari sisi daya tarik dan sarana prasarana fisik, tetapi juga kapasitas para pengelola. Melalui penelitian ini diperoleh gambaran kelebihan dan kekurangan kapasitas pengelola yang akan memudahkan rumusankebutuhan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang sesuai.

⁶ Salah satu tujuan PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatnya kapasitas masyarakat berusaha dan berkarya masyarakat di desa wisata dan sekitarnya, yang mencakup wilayah pedesaan atau komunitas masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsi dan peran (sebagai objek pendukung, pemasok bahan baku, pemasok logistik, dan sebagainya), sehingga masyarakat miskin yang berdomisili di sekitar daya tarik wisata atau pusat-pusat kegiatan pariwisata dan budaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya (Puspar UGM, 2012)

⁷ Dalam kondisi yang ideal proses pengembangan kapasitas masyarakat harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik masyarakat setempat, sebagaimana yang dikatakan Mathieson (1986:307) bahwa sebuah komunitas tidaklah homogen, tetapi memiliki homodikotongaman distribusi sumberdaya, tingkat pendidikan, pengalaman di bidang pariwisata, tingkat keterlibatan, sejarah, unsur politis, administratif, dan kondisifitas daerah masing-masing.

dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin inap.

Dalam hal kepemimpinan dan koordinasi *pertama* diuhkan pelatihan dan kaderisasi kepemimpinan bagai tata pengelola lainnya untuk menghindari ketergantungan pada pimpinan saat ini dalam menjalankan roda organisasi. diperlukan peningkatan kesadaran dan kinerja ola untuk melaksanakan rapat/pertemuan yang intensif rjadwal setiap bulannya agar koordinasi antar pengelola wisata menjadi lebih aktif.

Peningkatan kapasitas pengelola untuk menjaring mitra-aimnya seperti destinasi wisata terdekat, biro perjalanan (*agent*), hotel, restoran, dsb. Pelatihan promosi desa bagi segmen wisatawan yang lebih luas hingga luar dan mancanegara dibarengi pelatihan penyusunan paket wisata untuk bahan promosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri.2011.*Community Development* (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apu, Beata Maria Kurniawati. 2010. Implementasi PNPM Mandiri Pariwisata dalam Pengembangan Agrowisata Pengembangan Agrowisata di Desa Koanara Kabupaten Ende. Yogyakarta: Thesis UGM.
- Bardach, Eugene. 2001. *Developmental dynamics: Interagency collaboration as an emergent phenomenon*. *Journal of Public Administration Research and Theory* 2: 149-164.
- Brown, Lisanne; Lafound Anne; Macintyre, Kate. 2001. *Measuring Capacity Building*. Chapel Hill: Carolina Population centre/University of North Carolina.
- Cooper, Chris dan Hall, C. Michael. 2008. *Contemporary Tourism: An International Approach*. Oxford: ELSEVIER.
- Cresswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik, Janianton.2005.Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press.
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. 2006. Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi.Yogyakarta: Andi.
- Damanik, Janianton dan Teguh, Frans. 2012. Manajemen Destinasi Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press.

- Damanik, Jananton. 2013. Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demartoto, A. 2009. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Fandeli, Chafid. 2002. Perencanaan Kepariwisataan Alam Yogyakarta: Fak. Kehutanan UGM.
- Garrod, Brian. 2001. *Local Participation in the Planning and Management of Ecotourism: A Revised Model Approach* (Bristol: University of the West of England).
- Grindle, Merilee S. 1997. Editor and Contributor, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*(Cambridge, MA: Harvard University Press for Harvard Institute for International Development, 1997); Chapter 1, "The Good Government.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Cirajah Ilmu.
- Hausler, Nicole dan Strasdas, Wolfgang. 2002. Training Manual for Community Based Tourism. Germany: Inwent.
- Haven-Tang, Claredan Jones,Eleri. 2012.*Local leadership for rural tourism development: A case study of Adurhshire, UK*. Tourism Management Perspectives 4 (2012) 28–35.<http://www.academia.edu/1642316/>
- Kamariah, Najmi dan Tim peneliti STIA LAN Makassar. 2012. *Capacity Building. Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia*. <http://www.stialannmakassar.ac.id/> diakses 29 Oktober 2013.
- Kettl, Donald., Ingraham, Patricia W., Sanders, Ronald P., and Horner, Constance. 1996. *Civil Service Reform : Building a Government That Works*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Khoiron, Roni. 2013. Multipllier Effects dalam Industri Pariwisata. <http://fejjakwisata.com/tourism-studies/tourism-in-general/122-multiplier-effect-dalam-industri-pariwisata.html> diakses 13 Oktober 2013.
- Lane, B. 1994. *What is Rural Tourism?* *Journal of Sustainable Tourism*.2 (1):7-21.
- Látková, Pavlína and Vogt, Christine A. 2011. Residents' Attitudes toward Existing and Future Tourism Development in Rural Communities. *Journal of Travel Research* 2012 51:

Sulawesi Tenggara), Data Pusat Studi Pariwisata UGM, Tahun 2013).

Permanasari, Ika Kusuma. 2011. Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan. Jakarta : Tesis UI.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pariwisata 2013, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, <http://www.budpar.go.id> diakses 13 Oktober 2013.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDPA).

Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Raharjana, Destha Titi. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Pariwisata Studi Kasus di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Nasional Pariwisata Volume 4 No. 1 Hal. 12-25.

Razzaq, et.al . 2012. *Community Capacity Building for Sustainable Tourism Development: Experience from Miso Walai Homestay*. Business and Management Review Vol. 2(5) pp. 10 – 19.<http://www.businessjournalz.org/bmrdiakses> pada 3 Oktober 2013.

Sastrayuda, Gumelar S. 2010. Kosep Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata (Community Based Tourism). http://file.upi.edu/Direktori_FPIPS/LAINNYA/ diakses 13 Oktober 2013.

Sekolah Pascasarjana. 2012. Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis. Yogyakarta: SPS UGM.

Smith, V. L. 1989. *Hosts and Guests: the Anthropology of Tourism*, 2nd Edition. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Soetomo. 2009. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suansri, P. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Szilagyi Jr Andrew D and Wallace Jr. Marc.J. 1980. *Organizational Behavior and performance*, California: Goodyear Publishing Company.

Terry, George R. 2000. Prinsip-Prinsip Manajemen (Terjemahan oleh J. Smith D.F.M.). Jakarta: Bumi Aksara.

Timothy, D.J. 1999. "Participatory Planning: a View of Tourism in Indonesia" Annals of Tourism Research. 26 (2): 27-40.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

[Dewi, M.H.U, Fandeli, C., Damanik. J., Baiquini. 2013. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Tabanan, Bali. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Vol. 8 No. 1 Hal \(11-29\).](http://www.lukumanonline.com/pusatdata/detail/29086/nprt/1060/uu-no-10-tahun-2009-kepariwisataandiakses 6 Juli 2012.</p></div><div data-bbox=)

Wall, Geoffrey dan Mathieson, Alister. 2006. *Tourism: Change, Impacts, and Opportunities*. London: Pearson Prentice Hall.

Wall, Geoffrey dan V. Long. 1996. "Balinese homestays: an indigenous response to tourism opportunities" dalam *Tourism and Indigenous People*, R. Butler and T. Hinch. London: International Thomson Business Press.

Yoeti, Oka A. 2008. Ekonomi Pariwisata, Introduksi, Informasi, dan Implementasi. Jakarta: Kompas.

Sumber Internet :

<http://media.unwto.org/en/press-release/2013-05-15/international-tourism-receipts-grew-4-2012>

<http://www.indonesiaawonder.com/fid/destination/Gorontalo>

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/10/109131>

<http://www.investor.co.id/home/devisa-dari-pariwisata-capai-us85-miliar/51743>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kapital_sosial

<http://www.gorontalofamily.org>

<http://travel.kompas.com/read/2012/11/13/20054432/Gorontalo.Fokus.Kembangkan.Desa.Wisata>